

**STRATEGI KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KUALITAS  
MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI TINGKAT  
DESA KECAMATAN  
PANCUR BATU**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HENDRA SYAHPUTRA**

**10. 851. 0047**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 4**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)19/10/20

**STRATEGI KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KUALITAS  
MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI TINGKAT  
DESA KECAMATAN  
PANCUR BATU**

**SKRIPSI**

Oleh :

**HENDRA SYAHPUTRA**

**10.851.0047**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)19/10/20

## A B S T R A K

### Strategi Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa Kecamatan Pancur Batu

Oleh :  
Hendra Syahputra  
10.851.0047  
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini berjudul “Strategi Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa Kecamatan Pancur Batu”. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimana strategi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan”.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

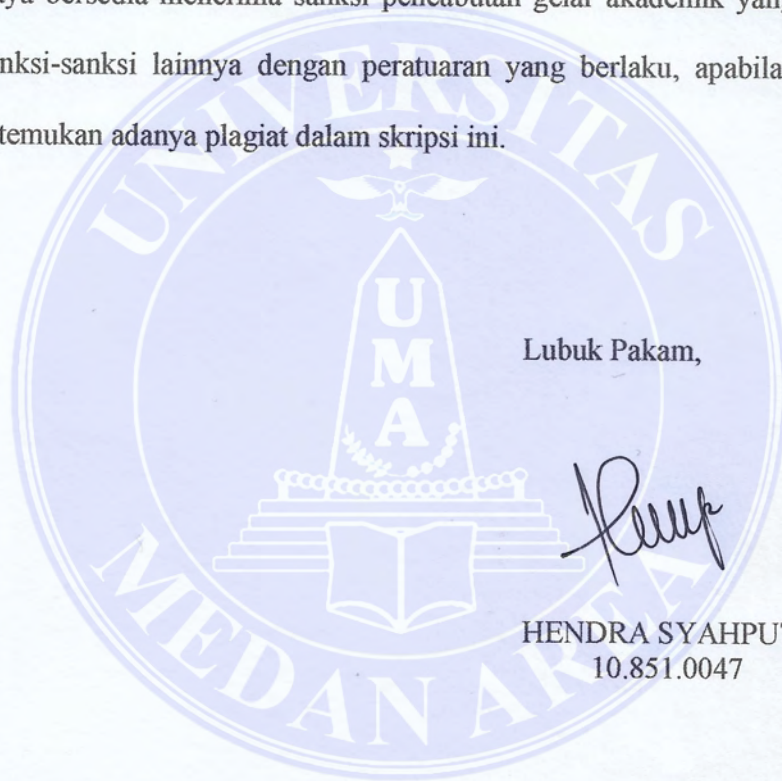
Rencana dan strategi kecamatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dapat dilihat melalui Rencana kerja dan isu strategis yang terdiri dari pembangunan ekonomi, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur dan infrastruktur wilayah.

Kata Kunci: *Kualitatif, deskriptif*

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Lubuk Pakam,

2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendra Syahputra', is written over the watermark logo.

HENDRA SYAHPUTRA  
10.851.0047

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Syahputra  
NPM : 10. 851. 0047  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul **STRATEGI KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KUALITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT DESA KECAMATAN PANCUR BATU.**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lubuk Pakam

Pada Tanggal : 21juni 2014

Yang menyatakan



(Hendra Syahputra)

## ABSTRACT

### *District Strategies in Increasing Community Participation and Quality of Development Planning Deliberations at the Village Level Pancur Batu District*

By:

*Hendra Syahputra*

*10.851.0047*

*Governmental Science Study Program*

*This research is entitled "District Strategies in Increasing Community Participation and Quality of Development Planning Deliberations at the Village Level, Pancur Batu District". Community participation is the main asset in achieving the government's program targets throughout the Republic of Indonesia. Success in achieving the target of implementing development programs is not solely based on the ability of government officials, but is also related to efforts to realize the capacity and security of the community to participate in the implementation of development programs. The formulation of the problem of this research is: "How is the district strategy in increasing community participation and the quality of development planning deliberations".*

*The method used in this study is a qualitative method, namely research on descriptive research and tends to use analysis.*

*District plans and strategies for increasing community participation in the development sector can be seen through work plans and strategic issues consisting of economic development, poverty, health, education, capacity building for regional apparatus and infrastructure.*

*Keywords : qualitative, descriptive*

## ABSTRACT

### *District Strategies in Increasing Community Participation and Quality of Development Planning Deliberations at the Village Level Pancur Batu District*

By:

*Hendra Syahputra*

*10.851.0047*

*Governmental Science Study Program*

*This research is entitled "District Strategies in Increasing Community Participation and Quality of Development Planning Deliberations at the Village Level, Pancur Batu District". Community participation is the main asset in achieving the government's program targets throughout the Republic of Indonesia. Success in achieving the target of implementing development programs is not solely based on the ability of government officials, but is also related to efforts to realize the capacity and security of the community to participate in the implementation of development programs. The formulation of the problem of this research is: "How is the district strategy in increasing community participation and the quality of development planning deliberations".*

*The method used in this study is a qualitative method, namely research on descriptive research and tends to use analysis.*

*District plans and strategies for increasing community participation in the development sector can be seen through work plans and strategic issues consisting of economic development, poverty, health, education, capacity building for regional apparatus and infrastructure.*

*Keywords : qualitative, descriptive*

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan, pada tanggal 15 Januari 1981 dari Ayah bernama Teng Teng Purba dan Ibu bernama Nurlan Br Singarimbun. Penulis merupakan putra ketiga dari enam bersaudara.

Tahun 2000 Penulis lulus dari SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan dan pada tahun 2010 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2004 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2009 sampai sekarang.

Penulis



HENDRA SYAHPUTRA  
10.851.0047



## ABSTRAK

### Strategi Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa Kecamatan Pancur Batu

Oleh :

Hendra Syahputra

10.851.0047

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini berjudul “Strategi Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa Kecamatan Pancur Batu”. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimana strategi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan”.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Rencana dan strategi kecamatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dapat dilihat melalui Rencana kerja dan isu strategis yang terdiri dari pembangunan ekonomi, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur dan infrastruktur wilayah.

Kata Kunci: *Kualitatif, deskriptif*

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Strategi Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Desa Kecamatan Pancur Batu”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Camat Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 2014

Penulis

Hendra Syahputra  
10.851.0047

# DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Pembatasan Masalah .....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
BAB II. LANDASAN TEORI .....	7
2.1. Uraian Teori .....	7
2.1.1. Partisipasi Dalam Pembangunan .....	7
2.1.2. Pengertian Partisipasi .....	9
2.1.3. Tipologi Partisipasi.....	14
2.1.4. Bentuk Partisipasi Masyarakat .....	16
2.2. Kerangka Konseptual .....	20
BAB III. METODE PENELITIAN .....	24
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
3.2. Populasi .....	24

3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.4. Definisi Operasional Variabel .....	25
3.5. Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	28
4.1.1. Keadaan Alam .....	28
4.1.2. Komposisi Masyarakat .....	30
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang .....	36
4.2. Pembahasan .....	37
4.2.1. Rencana Dan Strategi Kecamatan Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan .....	37
4.2.2. Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Pancur Batu .....	44
4.2.3. Faktor Kendala yang mempengaruhi Fungsi Legislasi BPD di Desa Bangun Sari .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Suku Di Kecamatan Pancur Batu Tahun 2014 .....	30
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan Di Kecamatan Pancur Batu Tahun 2014 .....	31
Tabel 3 Data Mata Pencaharian Penduduk Di Kecamatan Pancur Batu Tahun 2014 .....	31
Tabel 4 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Pancur Batu Tahun 2014 .....	33
Tabel 5 Jumlah Pemeluk Agama Dan Rumah Ibadah Di Kecamatan Pancur Batu Tahun 2014 .....	35
Tabel 6 Matriks Perencanaan Partisipatif Dalam proses Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Pancur Batu .....	54

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Skema Kerangka Konseptual .....	23
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang .....	37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.



Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Kecamatan di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh Pemerintah Kecamatan yaitu : penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di kecamatan ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi.

Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal.

Sebagai sarana partisipasi masyarakat di desa telah di bentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat (LPKM). Melalui lembaga ini masyarakat di harapkan dapat membantu mempercepat atau mengefektifkan pembangunan di kecamatan dan Pembangunan Nasional pada Umumnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang

betul-betul sesuai dengan apa yang di butuhkan dan dirasakan oleh mereka. Demikian pula halnya dengan pembangunan di Kecamatan Pancur Batu, nampaknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan raya, jembatan, pos kamling, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya.

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikecamatan yaitu sarana ibadah dalam hal ini adalah pembangunan masjid. Dalam pembangunan tersebut masyarakat terlibat aktif mulai dari proses perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan pembangunan, bahkan dana yang di gunakan pada pembangunan masjid tersebut merupakan swadaya masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti secara mendalam partisipasi masyarakat di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kecamatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut dengan judul penelitian “Strategi Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa Kecamatan Pancur Batu”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa tersosialisasi secara baik.
2. Kurangnya respon masyarakat atas pelaksanaan pembangunan di

lingkungannya.

3. Efektivitas pelaksanaan pembangunan tidak dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam Musrembang di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan”.

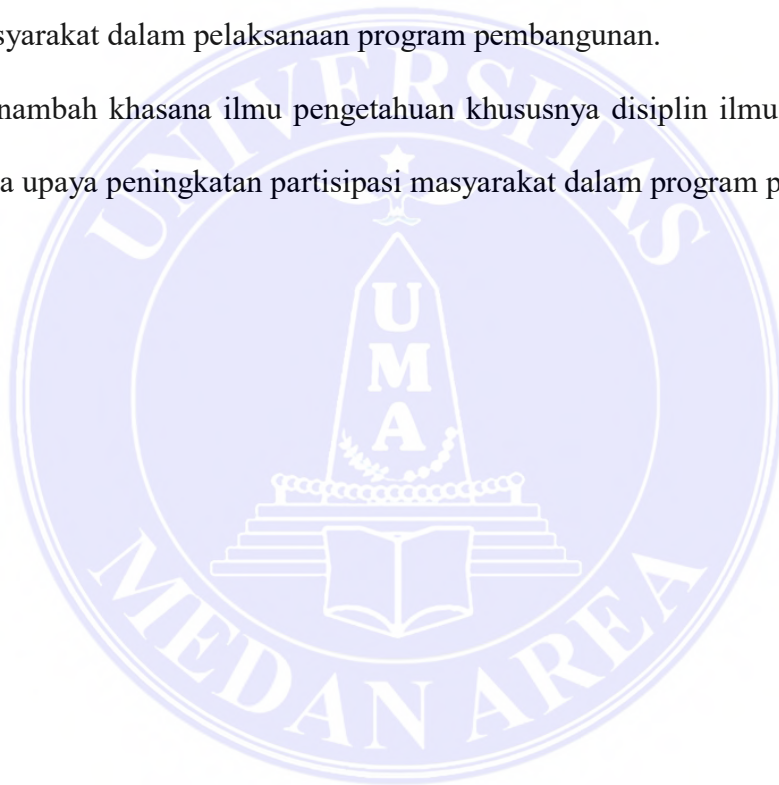
### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prtisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penilaian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi masukan bagi Camat pada Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang dan Instansi-Instansi yang terkait di dalamnya untuk pencapaian pelaksanaan program pembangunan pada wilayahnya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparatur pemerintah yang dapat di jadikan sebagai sumber pustaka atau bahan bacaan, maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan dalam kajian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.
3. Menambah khasana ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu pemerintahan serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.1. Partisipasi dalam Pembangunan

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat. Menurut Gunardi, Agung, Purnaningsih dan Lubis (2007: 43), partisipasi merupakan konsep yang sulit untuk dilaksanakan terutama pada masyarakat perkotaan yang lebih bersifat individualistis dan bersikap skeptis terhadap pembangunan. Masalah ini terutama muncul dikalangan masyarakat yang sering dikecewakan oleh program-program pembangunan sebelumnya, sehingga mereka cenderung curiga terhadap program-program yang hanya menguntungkan sekelompok orang saja.

Penegakan prinsip partisipasi masyarakat merupakan upaya yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Pengalaman program-program pembangunan sebelumnya, yang merepresentasikan peran yang dominan ditangan aparat pemerintah, banyak berpengaruh terhadap melemahnya daya prakarsa masyarakat. Sementara itu ditingkat pemerintahan pun secara umum terdapat kecenderungan kuat untuk bersikap menunggu dan meneruskan keputusan dari tingkat yang lebih tinggi, daripada mengambil inisiatif untuk merespons tuntutan dari bawah (Hikmat, 2006:32).

Menurut Siagian (2000:22), keberhasilan kegiatan pembangunan akan lebih terjamin apabila seluruh warga masyarakat membuat komitmen untuk turut berperan sebagai pelaku pembangunan dengan para anggota elite masyarakat sebagai panutan, pengarah, pembimbing dan motivator. Dengan perkataan lain,

partisipasi masyarakat luas mutlak diperlukan oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan tersebut. Agar masyarakat mau dan tertarik untuk berpartisipasi, perlu kiranya menciptakan kondisi agar pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kriteria :

1. Menguntungkan masyarakat.
2. Harus dipahami maksudnya oleh masyarakat.
3. Dilaksanakan sesuai maksudnya secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. (Sumber : Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan*)

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikemukakan juga oleh Sudriamunawar (2006:11) :

1. Dengan peran serta masyarakat akan lebih banyak hasil kerja yang dicapai.
2. Dengan peran serta masyarakat pelayanan atau servis dapat diberikan dengan biaya murah.
3. Peran serta masyarakat memiliki nilai dasar yang sangat berarti dalam menjalin persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat.
4. Peran serta masyarakat merupakan katalisator untuk kelangsungan pembangunan selanjutnya.
5. Peran serta masyarakat dapat menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan di masyarakat.
6. Peran serta masyarakat lebih menyadarkan masyarakat itu sendiri terhadap penyebab dan kemiskinan sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengatasinya. (Sumber : Haryono Sudriamunawar, *Kepemimpinan*)

### 2.1.2. Pengertian Partisipasi

Partisipasi mempunyai beberapa pengertian seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Safi'i (2007:8), kata partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Selanjutnya partisipasi menurut Sastrodipoetra dalam Safi'i (2007) adalah "keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama".

Menurut Adisasmita (2006:37) partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Syahyuti (2006:78) mengemukakan istilah partisipasi sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Pembangunan yang partisipatif (*participatory development*) adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka.

Sudriamunawar (2006:55) mengutip istilah partisipasi menurut Direktur Jendral Pengembangan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program atau kegiatan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kesadaran timbul



karena adanya kepentingan yang dapat dicapai melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Dilihat dari pengertian partisipasi di atas, bahwa seseorang atau sekelompok orang akan terlibat dalam partisipasi tergantung kepada kesadaran, kemauan dan dorongan (motif) dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Faisal (tanpa tahun) kemauan dapat diartikan sebagai perbuatan psikis yang mengandung usaha aktif berhubungan langsung dengan pelaksanaan suatu tujuan. Kemauan dilihat dari proses tumbuhnya kebutuhan pribadi individu, adanya kesadaran akan tujuan, adanya pelaksanaan tujuan yang disertai tingkah laku.

Menurut Panjaitan, Nitimihardjo dan Fachrudin (2007:8), motif adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya motif terbentuk karena adanya kebutuhan pada diri manusia (*biological need dan psychological need*). Harapan cenderung mempengaruhi motif atau kebutuhan.

As'ad (1981:32) mengemukakan istilah motif sebagai dorongan atau tenaga yang merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif tersebut merupakan suatu *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut Walgito (1983:33), tingkah laku manusia dipengaruhi oleh tiga kemampuan kejiwaan yang merupakan satu kesatuan dan tidak bisa terlepas satu dengan yang lain, yaitu :

1. Kognisi, yang berhubungan dengan pengenalan. Menurut Irwanto (1994), dalam kognisi ada proses evaluatif, membandingkan, menganalisis atau

mendayagunakan pengetahuan yang ada untuk memeriksa suatu rangsang.

2. Emosi (Afeksi), yang berhubungan dengan perasaan. Menurut Irwanto (1994), dalam emosi ada perasaan senang dan tidak senang serta perasaan emosional lain sebagai akibat/hasil dari proses evaluatif yang dilakukan. Perasaan ini berpengaruh kuat terhadap perilaku seseorang.
3. Konasi, yang berhubungan dengan kemauan, yaitu kecenderungan untuk bertindak laku tertentu.

Menurut Direktorat Penyuluhan dan Bimbingan Sosial (1980), untuk menggerakkan setiap orang supaya mau berpartisipasi maka perlu diciptakan perasaan kepentingan bersama, saling ikut memiliki dan bertanggung jawab dan berusaha menghilangkan jarak sosial serta prasangka sosial. Di dalam menciptakan perasaan adanya kepentingan bersama dan saling ikut memiliki serta tanggung jawab maka perlu dicari motivasi dalam kebutuhan hidup manusia.

Menurut Irwanto, Elia, Hadisoepadma, Priyani, Wismanto dan Fernandes (1994:91) motivasi adalah penentu (determinan) perilaku. Terdapat tiga determinan penyebab terjadinya perilaku, yaitu :

1. Determinan yang berasal dari lingkungan (kegaduhan, bahaya dari lingkungan, desakan guru dan lain-lain)
2. Determinan dari dalam diri individu (harapan/cita-cita, emosi, keinginan dan lain-lain)
3. Tujuan/insentif/nilai dari suatu objek. Faktor-faktor ini berasal dari dalam diri individu (kepuasan kerja, tanggung jawab dan lain-lain) atau dari luar individu (status, uang dan lain-lain). (Sumber : Irwanto, Elia, Herman, Hadisoepadma, Antonius, Priyani, MJ Retno, Wismanto, Yohanes Bagus & Fernandes,

*Psikologi Umum)*

Dalam memandang perilaku manusia yang merupakan hasil interaksi dengan sistem lingkungan sosialnya, terdapat tiga sistem yang mendasar seperti yang dikemukakan oleh Nitimihardjo (2007:105), yaitu :

1. Sistem mikro, yaitu berkenaan dengan individu yang terdiri atas sistem biologis, psikologis dan sosial, dimana ketiga sistem tersebut saling berinteraksi dan saling berpengaruh.
2. Sistem mezo, yaitu berkenaan dengan kelompok kecil, seperti keluarga, kelompok kerja dan kelompok-kelompok sosial lainnya.
3. Sistem makro, yaitu berkenaan dengan sistem yang lebih besar dari kelompok kecil. Orientasi makro memusatkan pada kondisi dan kebijakan sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. (Sumber : Carolina Nitimihardjo, *Tingkah laku manusia dan lingkungan sosial*)

Sudriamunawar (2006:42) mengemukakan tentang persyaratan partisipasi sebagai berikut :

1. Aspek partisipasi yang paling mendasar adalah luasnya pengetahuan dan latar belakang yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi sebagai prioritas dan melihat berbagai masalah dalam konteksnya yang tepat.
2. Adanya kemampuan untuk belajar secara lebih cepat tentang berbagai masalah sosial dalam pengambilan keputusan.
3. Kemauan untuk bertindak secara lebih efektif. (Sumber : Haryono

Sudriamunawar, *Kepemimpinan*)

Seseorang akan berpartisipasi apabila terpenuhi faktor-faktor atau prasyarat diatas. Jika salah satu faktor dari ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi,

maka hampir dapat dipastikan bahwa partisipasi tidak akan pernah terjadi.

### **2.1.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Dalam pelaksanaan partisipasi, seseorang, kelompok, atau masyarakat dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam berbagai bentuk atau jenis partisipasi yang disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan mereka untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Bentuk partisipasi yang diperinci dalam jenis-jenis partisipasi menurut rumusan Direktur Jendral Pengembangan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri yang dikutip oleh Sudriamunawar (2006:85) sebagai berikut :

#### **1. Partisipasi Buah Pikiran**

Partisipasi disini memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok masyarakat itu turut serta menyumbangkan ide-ide bagi pembangunan masyarakat. Contohnya adalah kegiatan anjang sono, rapat desa, musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Desa.

#### **2. Partisipasi Tenaga dan Fisik**

Partisipasi yang bersifat aktif yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat desa perkembangan peran serta tenaga dan fisik ini tampak pada pekerjaan gotong royong dalam perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah, pendidikan dan sebagainya.

#### **3. Partisipasi Ketrampilan dan Kemahiran**

Partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam bentuk kemahiran dan keterampilan yang dimilikinya untuk keperluan pembangunan desanya. Misalnya dalam kegiatan peringatan hari Kemerdekaan, warga desa

mengerahkan masyarakatnya yang memiliki kemampuan dalam seni untuk menghias dan menata desa dengan sebaik dan seindah mungkin.

#### 4. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi yang dilakukan warga masyarakat dalam bentuk sumbangan baik berupa barang maupun benda. Hal ini biasanya dilakukan seseorang bila dia tidak mampu untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan. Tidak bisanya untuk ikut berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di desa biasanya karena sudah uzur, sedang sakit atau sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan.

Contohnya menyumbang makanan untuk masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti/gotong royong, memberikan sumbangan berupa makanan, minuman atau uang.

(Sumber : Haryono Sudriamunawar, *Kepemimpinan*)

Hamijoyo dan Iskandar yang dikutip oleh Huraerah (2007:103) menambahkan bentuk partisipasi selain yang dikemukakan di atas yaitu partisipasi sosial berupa partisipasi yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayad dalam peristiwa kematian, kondangan dalam peristiwa pernikahan.

Dengan memperhatikan pembagian partisipasi masyarakat diatas, dapat terlihat luasnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan orang, kelompok atau masyarakat jika akan berpartisipasi. Dalam pelaksanaan partisipasi sosial tidak hanya keikutsertaan setiap orang saja yang diperlukan tetapi juga peranan aktif apa yang bisa diperbuat serta disumbangkan perlu mendapat perhatian.

Soetrisno mengemukakan tentang ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat

untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu (Huraerah, 2007:97).

Partisipasi atau peran serta masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan baik dalam suatu aktivitas masyarakat dalam pembangunan, dapat diukur dengan kriteria-kriteria sebagai berikut (Sudriamunawar, 2006:32) :

1. Adanya pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat secara aktif dan dinamis.
2. Adanya objek pembangunan sehingga peran serta masyarakat akan terlihat aktif dan dinamis.
3. Ketertarikan dan keeratan hubungan yang harmonis baik antara sesama anggota masyarakat maupun masyarakat itu sendiri dengan pemimpinnya.
4. Adanya tujuan hidup dan kebutuhan yang sama dimana hal ini merupakan kekuatan dan modal yang besar untuk melakukan kegiatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Adanya kemampuan masyarakat itu sendiri dalam menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungan sekitarnya.
6. Adanya iklim yang memungkinkan timbulnya peran serta masyarakat.

(Sumber : Haryono Sudriamunawar, *Kepemimpinan*)

Menurut Najib yang dikutip oleh Huraerah (2007:90), keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh :

1. Siapa penggagas partisipasi; apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau LSM

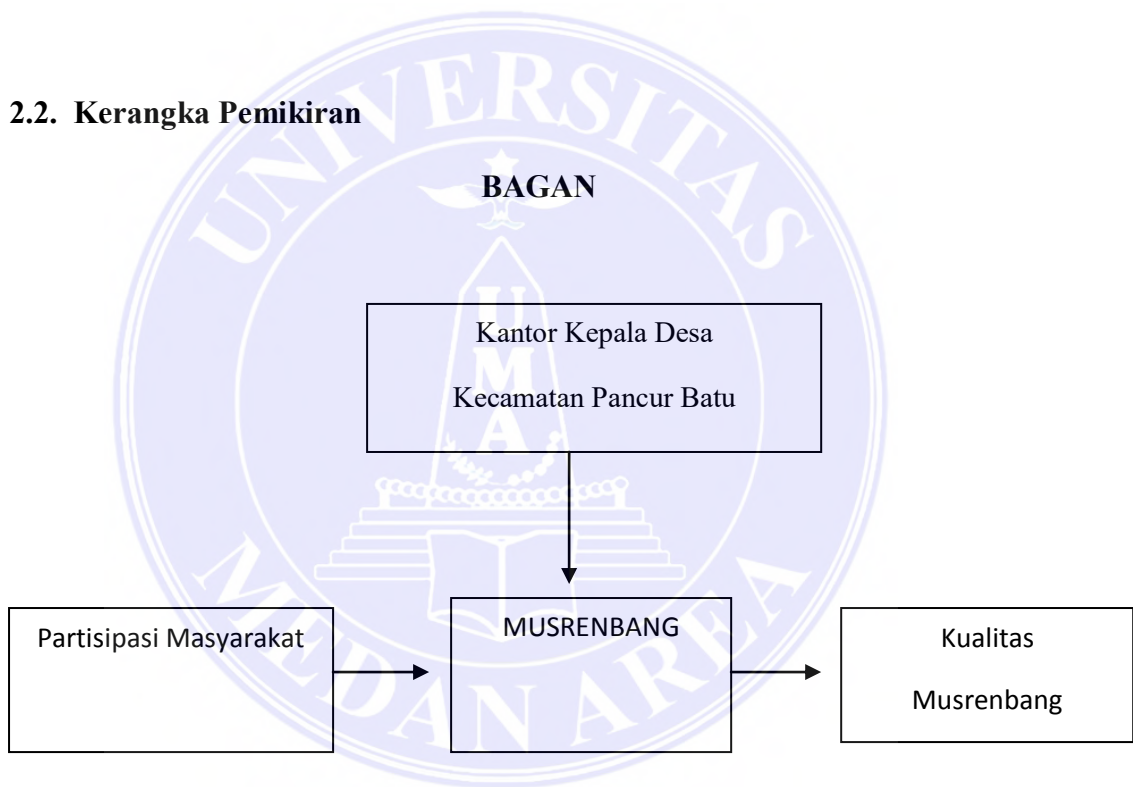
2. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan: apakah untuk kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat. Jika untuk kepentingan warga maka program kemiskinan dengan pendekatan partisipasi masyarakat akan lebih berlanjut.
3. Siapa yang memegang kendali: apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah atau LSM yang memegang kendali cenderung lebih berhasil, karena pemerintah daerah atau LSM cenderung lebih mengetahui permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibanding pihak luar.
4. Hubungan pemerintah dengan masyarakat: apakah ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahnya, jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.
5. Kultural: daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
6. Politik: pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keberagaman dan demokratis.
7. Legalitas: tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).
8. Ekonomi : adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
9. Kepemimpinan: adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen

untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.

10. Waktu: penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.

11. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga). (Sumber : Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat)

## 2.2. Kerangka Pemikiran





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

(Sumber : <http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kualitatif.html>)

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Waktu Penelitian dilakukan pada akhir Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Maret 2014.

#### 3.2. Populasi

Dalam Penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Pancur Batu.

#### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di gunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam Study kepustakaan ini penulis berusaha menelaah berbagai bahan

bacaan/Pustaka berupa buku-buku, majalah, surat kabar, undang-undang, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di teliti.

b. Study Lapangan (*field Research*)

Study Lapangan ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah di tentukan secara langsung. Study lapangan di tempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan terhadap objek secara langsung.
2. Interview yaitu wawancara langsung dengan informan yang telah di tentukan.

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah pelaksanaan program pembangunan fisik, maka perlu adanya batasan penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator – indikator sebagai berikut :

### 3.5. Analisis Data

Data yang di kumpulkan akan di analisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Pada analisis kualitatif, kata-kata di bangun dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk di deskripsikan dan dirangkum. Analisis tersebut di dukung oleh tabel frekwensi pada beberapa variabel pendukung yang di jadikan indikator dalam penelitian ini. Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara tunggal dilakukan dengan tabel frekwensi dengan analisis deskriptif dengan menentukan rentang skala.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang belum dilaksanakan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pada tahap persiapan yakni penetapan tim fasilitator musdes kriteria perencanaan partisipatif aspek fokus perencanaan dan partisipatoris tidak terakomodasi di dalamnya, hanya aspek sinergitas dan legalitas yang terpenuhi. Hal ini karena memang urgensi pada tahap ini adalah menyangkut aspek sinergitas dan legalitas saja sedangkan kedua aspek yang lainnya yakni fokus perencanaan dan partisipatoris tidak menjadi prioritas. Maka berdasarkan argumentasi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tahap penetapan tim fasilitator musdes telah berjalan dengan baik.
- b. Pada tahapan musyawarah pra musdes yakni pada proses penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat belum dilakukan dengan maksimal karena sebagian besar RT dan dusun belum melaksanakan tahapan ini. Sebagian kecilnya melakukan kegiatan ini dengan cara informal dan tidak representatif. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas desa. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses

penyelidikan masalah dan kebutuhan, sebagian melakukan proses penyelidikan tersebut dengan cara informal dimana hanya sebagian kecil perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sehingga semua kriteria perencanaan partisipatif tidak terakomodasi pada tahap ini, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tahap musyawarah pra musdes belum berjalan dengan baik.

- c. Tahap penetapan tim penyelenggara musdes telah berjalan dengan baik, karena di dalamnya telah mengakomodasi kriteria legalitas yang menjadi urgensi tahapan ini. Tim dibentuk meliputi unsur pemerintah desa dan LPMD.
- d. Tahap pemaparan oleh perwakilan elemen masyarakat dilakukan dengan format dialogis. Pada tahap ini kriteria perencanaan partisipatif yang meliputi aspek partisipatoris dan sinergitas yang merupakan kriteria prioritas pada tahapan ini telah terpenuhi dengan baik. Unsur-unsur masyarakat melalui perwakilannya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasannya kepada forum, selain itu pada tahap ini interaksi antar stakeholder pembangunan pun terjalin dengan cukup masif. Maka dapat disimpulkan bahwa tahap ini telah berjalan dengan baik
- e. Agenda pembahasan dan penetapan prioritas usulan dari desa yang akan diajukan ke kecamatan tidak dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Penetapan diserahkan kepada tim perumus RKPDes yang telah dibentuk. Dari keterangan ini dapat diinterpretasikan bahwa kriteria perencanaan partisipatif yang urgent yakni fokus perencanaan dan partisipatoris tidak terakomodasi dengan baik.

- f. Tahap Pemilihan dan penetapan delegasi desa telah memnuhi aspek sinergitas dan legalitas yang merupakan aspek prioritas pada tahapan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahapan ini telah berjalan dengan baik.
2. Faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
- a. Faktor lemahnya proses penyelidikan dan pengalihan masalah dan kebutuhan masyarakat menjadi penyebab rendahnya kualitas fokus perencanaan. Pemicunya lebih di dominasi oleh ketidakfahaman perangkat RT mengenai perencanaan pembangunan, selain itu, minimnya informasi, sosialisasi dan pencerdasan dari pemerintah desa menjadi faktor pendorong ketidakfahaman perangkat RT. Penyebab lain dari lemahnya kegiatan penyelidikan adalah asumsi warga yang menganggap kegiatan tersebut tidak memberikan perbaikan dalam kehidupan warga. Lemahnya hasil penyelidikan atas masalah dan kebutuhan masyarakat inilah yang membuat fokus perencanaan menjadi rendah.
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat pada dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor antara lain Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan, Tidak adanya asas persamaan di dalam forum musbang pada saat penyampaian gagasan, kesempatan hanya diberikan kepada unsur-unsur masyarakat tertentu saja, Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih tinggi, Sosialisasi perencanaan pembangunan tidak dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat secara luas, waktu

kerja sebagian masyarakat yang berbenturan dengan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Serta waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang relatif pendek sehingga tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan tahap musyawarah pra musdes terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini juga perlu di tingkatkan.
3. Pada tahap pembahasan dan penetapan prioritas usulan perlu adanya fokus perencanaan dan partisipasi dari masyarakat agar usulan yang nantinya dibawa ke forum yang lebih tinggi, murenbang kecamatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperoleh legitimasi dari masyarakat karena telah melalui mekanisme yang dialogis dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Jogjakarta.
- As'ad, Moh. 1981. *Psikologi Industri*. Liberty. Yogyakarta.
- Gunardi, Agung, Sarwititi S, Purnaningsih, Ninuk & Lubis, Djuara P. 2007, *Pengantar Pengembangan Masyarakat*. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora. Bandung.
- Huraerah, Abu. 2007. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Humaniora. Bandung.
- Irwanto, Elia, Herman, Hadisoepadma, Antonius, Priyani, MJ Retno, Wismanto, Yohanes Bagus & Fernandes, Cosmas. 1994. *Psikologi Umum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Nitimihardjo, Carolina. 2007. *Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial*. Pustaka Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Bandung.
- Panjaitan, Nurmala, Nitimihardjo, Carolina & Fahrudin, Adi. 2007. *Prilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial*. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Safi'i, H.M. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Averroes Press. Malang
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan. Peran Serta dan Produktivitas*. Mandar Maju. Bandung.
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. PT Rena Pariwara. Jakarta
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.*
- Ekspose Camat Pancur Batu Dalam Rangka Kunjungan Kerja Bupati Deli Serdang Tahun 2014.*
- Struktur Organisasi Kantor Camat Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur\\_organisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi)